

2025



RENJA PERUBAHAN BPKPAD



HALAMAN VERIFIKASI

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator
Pada Tanggal : 05 Juni 2025

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan



EWIEK KHAVIDA, S.STP., M.M.
NIP. 198311182002122001

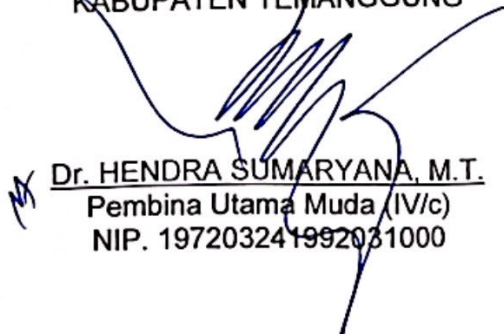
PETUGAS VERIFIKATOR



TAUFAN RINALDI, S.STP.
NIP. 199710192022012002

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197203241992031000

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja (Renja) BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

Penyusunan Perubahan Renja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penyempurnaan Renja Tahun 2025. Perubahan Renja disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2025, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKPAD Kabupaten Temanggung yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang ada.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Renja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Perubahan Renja BPKPAD Kabupaten Temanggung, terutama apabila dilakukan reviu atas Renja BPKPAD Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga Perubahan Renja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 10 Juni 2025

KEPALA BPKPAD
KABUPATEN TEMANGGUNG



NIP. 19731020 199903 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN VERIFIKASI..... ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL v

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan..... 1

 1.2. Landasan Hukum 2

 1.3. Maksud dan Tujuan 4

 1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025..... 6

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 6

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN..... 12

 3.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025..... 12

 3.2. Matriks Rencana Perubahan Renja BPKPAD Tahun 2025 21

BAB IV PENUTUP 29

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 6

Tabel 2. 2 Realisasi Keuangan dan Kegiatan pada triwulan I yang telah mencapai ≥ 50%..... 7

Tabel 2. 3 Realisasi Keuangan dan Kegiatan pada triwulan I yang belum mencapai 25%..... 9

Tabel 2. 4 Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025 10

Tabel 3. 1 Rancangan Rencana Program Dan Kegiatan Pada Perubahan RKPD Tahun 2025 13

Tabel 3. 3 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung Tahun 2025 22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 25 ayat 2: “RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD”, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Perubahan Rencana Kerja BPKPAD Kabupaten Temanggung. Perubahan Renja BPKPAD Kabupaten Temanggung merupakan dokumen perencanaan pembangunan BPKPAD berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan BPKPAD, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja BPKPAD Kabupaten Temanggung juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) BPKPAD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026. Renstra BPKPAD Kabupaten Temanggung merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Perubahan Renja BPKPAD Kabupaten Temanggung disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.

Renja Perubahan BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan BPKPAD Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dana aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2025 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dilakukan apabila dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa dinamika yang menuntut penyesuaian kegiatan sehingga harus dilakukan perubahan. Adapun alasan/pertimbangan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Adanya Penambahan Pagu Anggaran atas Tindak Lanjut Temuan BPK dan tindak lanjut MCP (*Monitoring Centre for Prevention*) Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI.
3. Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah;
4. Adanya penambahan atau pengurangan target kinerja output;
5. Munculnya sub kegiatan baru;
6. Adanya perubahan lokasi dan kelompok sasaran sub kegiatan;
7. Adanya penghapusan sub kegiatan;
8. Adanya kebutuhan mendesak yang perlu segera ditindaklanjuti;

Bappeda Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Perubahan Renja Perubahan Tahun 2024 melalui tahapan-tahapan :

- 1) Persiapan penyusunan
- 2) Penyusunan rancangan awal
- 3) Penyusunan rancangan
- 4) Perumusan rancangan akhir

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja BPKPAD Kab Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; disesuaikan dengan perda yang terbaru
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai penyempurnaan Renja Tahun 2025. pedoman bagi BPKPAD Kabupaten Temanggung dalam rangka menyesuaikan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2025, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja BPKPAD Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKPAD yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Renja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2025, antara lain:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan.
2. Sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan, dan Subkegiatan BPKPAD Kabupaten Temanggung yang akan dilaksanakan pada triwulan ketiga dan keempat Tahun 2025.
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan BPKPAD Kabupaten Tahun 2025.
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan BPKPAD Kabupaten Tahun 2025.

5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Perubahan Renja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKPAD TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB IV	PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Dalam melakukan penyusunan Perubahan Renja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja BPKPAD sampai dengan triwulan I Tahun 2025 (evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja unuk tahun berjalan) terhadap capaian Renja BPKPAD Tahun 2025 secara keseluruhan.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja BPKPAD Tahun 2025 dengan realisasi capaian kinerja sampai dengan triwulan I.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BPKPAD Tahun 2024 sampai dengan triwulan I maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program, kegiatan, dan Subkegiatan BPKPAD sebagai berikut :

- 1. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan yang telah mencapai 25%.
- 2. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan yang melebihi 25%.
- 3. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan yang diperkirakan tidak memenuhi target kinerja dengan penjelasan berupa:
 - a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan.
 - b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra BPKPAD.
 - c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kriteria pendapaian dalam Renja Perubahan tahun 2025 didasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Capaian indikator kinerja disajikan sebagai sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100,00%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90,00%	Tinggi
3	66% ≤ 75,00%	Sedang
4	51% ≤ 65,00%	Rendah
5	≤ 50,00%	Sangat Rendah

Perubahan Renja BPKPAD Tahun 2025 merupakan tahun Kedua penjabaran RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 khususnya yang dijabarkan lebih lanjut melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Adapun hasil evaluasi sebagaimana disajikan pada tabel-tabel dibawah ini:

1. Sub Kegiatan yang telah melampaui target dari perencanaan (dengan Asumsi Triwulan I sudah terlaksana lebih dari 25%).

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan dan Kegiatan pada triwulan I yang telah mencapai ≥ 25%

KODE	BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU		REALISASI KEUANGAN	KINERJA		
		Rp(Renja)	Rp(DPA)	Rp	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Program pengelolaan keuangan daerah						
1	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	764.999.700	336.000.000	11.772.511	1236	309	25
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	235.000.000	224.500.000	10.531.000	2	1	50
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	440.500.000	151.382.000	477.500	1236	309	25
B	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah						
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah						
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	1.099.648.000	486.644.625	4.718.750	1236	309	25
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	90.000.000	63.715.000	150.000	412	412	100
C	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah						
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						
	Analisa Dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	-	440.000.000	555.000	1	1	100

KODE	BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU		REALISASI KEUANGAN	KINERJA		
		Rp(Renja)	Rp(DPA)	Rp	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	375.000.000	95.000.000	11.807.000	12	3	25
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	258.000.000	205.000.000	821.400	12	3	25
	Penagihan Pajak Daerah	23.093.000	23.093.000	1.510.000	12	3	25
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	54.094.000	28.355.200	2.134.000	12	3	25
D	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
1	Administrasi Keuangan						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.812.793.306	22.380.891.785	4.178.260.861	8.036	8.036	100
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	375.000	12	3	25
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000	35.000.000	898.400	12	3	25
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	15.000.000	765.000	12	3	25
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	80.000.000	73.500.000	1.808.800	12	3	25
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	52.000.000	11.669.797	12	3	25
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	-	0	12	3	25
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	230.000.000	230.000.000	46.325.307	12	3	25
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	390.000.000	750.843.200	225.757.699	12	3	25
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.000.000	80.000.000	9.491.000	51	51	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	50.000.000	752.000	2	2	100

KODE	BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU		REALISASI KEUANGAN	KINERJA		
		Rp(Renja)	Rp(DPA)	Rp	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	25.000.000	0	45	45	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	47.500.000	0	919	919	100

2. Capaian Sub Kegiatan yang belum memenuhi target dari perencanaan (dengan Asumsi triwulan I belum mencapai dari 25%), yaitu:

Tabel 2. 3
Realisasi Keuangan dan Kegiatan pada triwulan I yang belum mencapai 25%

KODE	BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU		REALISASI KEUANGAN	REALISASI		CAPAIAN 2024
					TARGET	REALISASI	
		Rp(Renja)	Rp(DPA)				
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Program pengelolaan keuangan daerah						
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	57.600.000	30.000.000	480.000	2	0	-
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	41.750.000	17.500.000	0	2	0	-
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	235.000.000	100.000.000	1.182.000	2	0	-
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	220.000.000	125.000.000	0	2	0	-
B	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah						
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah						
	Penyusunan Standar Harga	25.500.000	14.516.500	0	2	0	-

Berdasarkan tabel 2.3 terdapat beberapa sub kegiatan yang belum terealisasi
Antara lain :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS.
Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS sampai dengan Triwulan I 2025 capaian realisasinya sebesar 0. sub kegiatan ini adalah dalam rangka mendukung kegiatan penyusunan KUA dan PPAS tahun 2026.

Sampai dengan triwulan I tahun 2025 kegiatan ini belum terlaksana. Proses akan dimulai pada Mei-Juni 2025 dan akan tercapai pada Triwulan III tahun 2025

- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sampai dengan Triwulan I 2025 capaian realisasinya sebesar 0. sub kegiatan ini adalah dalam rangka mendukung kegiatan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun 2025. Sampai dengan triwulan I tahun 2025 kegiatan ini belum terlaksana. Kegiatan ini dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan.

- c. Sub Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

Sub Kegiatan ini sampai dengan triwulan I 2025 capaian realisasinya sebesar 0 dikarenakan proses penyusunan Perda tentang APBD tahun 2026 akan dilaksanakan pada Agustus-Oktober dan akan tercapai di Triwulan IV

- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.

capaian realisasi kinerja sebesar 0 dikarenakan proses perubahan APBD baru akan dimulai pada bulan Oktober-November dan akan tercapai pada Trwulan IV.

Adapun Indikator pencapaian kinerja BPKPAD yang menggambarkan pelayanan BPKPAD dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2. 4
Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025

No	IKD	Satuan Target	Target Kinerja				Realisasi s.d tw I taun 2025	Capaian s.d tw I 2025	Skala Nilai
			2024	2025	2026	Kondisi Akhir 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah	%	15,5	15,75	16	16	27,35	100	Sangat Tinggi
2	Opini BPK atas LKPD	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi
3	Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	%	91	93	95	95	100	100	Sangat Tinggi
4	Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi
5	Persentase penerbitan SP2D online yang tepat	%	100	100	100	100	100	100	Sangat

No	IKD	Satuan Target	Target Kinerja				Realisasi s.d tw I taun 2025	Capaian s.d tw I 2025	Skala Nilai
			2024	2025	2026	Kondisi Akhir 2026			
	waktu								Tinggi
6	Cakupan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	%	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi
7	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi
8	Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah Tepat Wakt	%	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi
9	Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	80	80	85	85	100	100	Sangat Tinggi
10	Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah	%	8	9	10	10	76,62	100	Sangat Tinggi
11	Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi
12	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	%	95	95,5	96	96	13,54	14,18	Sangat Rendah
13	Penyampaian Laporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi

Dalam Dokumen RPD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026 terdapat 2 (dua) indikator sasaran berpredikat telah tercapai yaitu Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan dan Opini BPK atas LKPD. Sedangkan untuk indikator program, terdapat 11(sebelas) Indikator dengan 10 (sepuluh) Indikator berpredikat sangat tinggi dan I (satu) Indikator berpredikat sangat rendah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Rencana Program, kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja BPKPAD dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta mencermati pelaksanaan dan kegiatan yang telah berjalan sampai dengan triwulan I. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja BPKPAD ini juga harus memperhatikan tujuan dan sasaran dari Renja awal BPKPAD Tahun 2025 serta kebijakan-kebijakan terkait dengan upaya Tindak lanjut temuan BPK dan MCP (*monitoring Centre for Prevention*) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI).

Secara lengkap maka Program dan Kegiatan Perubahan Renja BPKPAD Tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 3. 1
RENCANA PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumb er Dana	Keterangan
		Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD (Perbup II)	Pagu Indikatif	Renja	APBD		
1	2	3	4	5	6=5-3	7=5-4	8	9
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	23.749.143.186	19.753.400.551	21.720.466.526	(2.028.676.660)	1.967.065.975		
Administrasi Keuangan perangkat daerah	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	22.380.299.986	18.451.156.551	20.418.222.526	(1.962.077.460)	1.967.065.975		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22.380.299.986	18.451.156.551	20.418.222.526	(1.962.077.460)	1.967.065.975		Penambahan anggaran untuk Utang Belanja Insentif
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya bahan logistik kantor, terlaksananya perjalanan dinas,dan terpenuhinya instalasi listrik bangunan kantor	185.500.000	130.671.000	143.671.000	(41.829.000)	13.000.000		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10.000.000	6.986.000	9.986.000	(14.000)	3.000.000		penambahan anggaran 3 jt mengambil dari listrik

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumb er Dana	Keterangan
		Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD (Perbup II)	Pagu Indikatif	Renja	APBD		
1	2	3	4	5	6=5-3	7=5-4	8	9
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35.000.000	19.830.000	22.830.000	(12.170.000)	3.000.000		penambahan anggaran 3 jt mengambil dari listrik
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15.000.000	9.000.000	11.000.000	(4.000.000)	2.000.000		penambahan anggaran 2 jt mengambil dari listrik
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	73.500.000	68.855.000	63.855.000	(9.645.000)	(5.000.000)		pengurangan anggaran 5 juta digeser ke subkeg laun
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.000.000	26.000.000	36.000.000	(16.000.000)	10.000.000		penambahan anggaran 10 jt mengambil dari listrik
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terbayarnya listrik listrik dan air, terdistribusinya surat serta tersedianya jasa pelayanan umum kantor	980.843.200	974.572.000	952.972.000	(27.871.200)	(21.600.000)		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	230.000.000	230.000.000	210.000.000	(20.000.000)	(20.000.000)		pengurangan 20 jt digeser ke Sub kegiatan lain
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	750.843.200	744.572.000	742.972.000	(7.871.200)	(1.600.000)		pengurangan 1,6 jt digeser ke Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terbayarnya pajak kendaraan dinas, terpeliharanya gedung, sarana dan prasarana gedung kantor, serta pendukung gedung kantor	202.500.000	197.001.000	205.601.000	3.101.000	8.600.000		

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumb er Dana	Keterangan
		Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD (Perbup II)	Pagu Indikatif	Renja	APBD		
1	2	3	4	5	6=5-3	7=5-4	8	9
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80.000.000	74.851.000	81.851.000	1.851.000	7.000.000		penambahan anggaran 7 jt mengambil dari listrik dan Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50.000.000	50.000.000	51.600.000	1.600.000	1.600.000		pengurangan 1,6 jt digeser dari jasa pelayanan umum kantor
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25.000.000	24.650.000	29.650.000	4.650.000	5.000.000		penambahan anggaran 5 jt fasilitasi kunjungan tamu
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	47.500.000	47.500.000	42.500.000	(5.000.000)	(5.000.000)		
PROGRAM PENEGLOLAAN KEUANGAN DAERAH	-Persentase dokumen penganggaran tepat waktu -Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	411.261.694.364	396.576.408.360	400.772.289.874	(10.489.404.490)	4.195.881.514		

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumb er Dana	Keterangan
		Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD (Perbup II)	Pagu Indikatif	Renja	APBD		
1	2	3	4	5	6=5-3	7=5-4	8	9
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya koodinasi dan Penyusunan Peraturan daerah tentang APBD dan Perubahan APBD, Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD Terlaksananya Penyusunan KUA dan PPAS Serta Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	534.988.000	215.562.000	215.562.000	(319.426.000)	-		
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	55.000.000	17.692.500	17.692.500	(37.307.500)	-		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	40.000.000	10.844.000	10.844.000	(29.156.000)	-		
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	194.261.200	84.635.000	84.635.000	(109.626.200)	-		
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	245.726.800	102.390.500	102.390.500	(143.336.300)	-		

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumb er Dana	Keterangan
		Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD (Perbup II)	Pagu Indikatif	Renja	APBD		
1	2	3	4	5	6=5-3	7=5-4	8	9
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya pengelolaan Kas Daerah Kabupaten Temanggung	389.964.000	265.321.500	265.321.500	(124.642.500)	-		
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	389.964.000	265.321.500	265.321.500	(124.642.500)	-		Pergeseran antar rekening belanja
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota serta terlaksananya Pembinaan Akuntansi semua SKPD	695.476.000	289.655.900	289.655.900	(405.820.100)	-		
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	235.000.000	189.772.100	189.772.100	(45.227.900)	-		Pergeseran antar rekening belanja
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	460.476.000	99.883.800	99.883.800	(360.592.200)	-		Pergeseran antar rekening belanja

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumb er Dana	Keterangan
		Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD (Perbup II)	Pagu Indikatif	Renja	APBD		
1	2	3	4	5	6=5-3	7=5-4	8	9
Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuda	Tersalurkannya dana bantuan keuangan dan dana bagi hasil	409.641.266.364	395.805.868.960	400.001.750.474	(9.639.515.890)	4.195.881.514		
Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	392.152.666.000	386.005.132.086	386.005.132.086	(6.147.533.914)	-		
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2.500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	(1.500.000.000)	-		
Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	14.988.600.364	8.800.736.874	12.996.618.388	(1.991.981.976)	4.195.881.514		Penambahan pagu anggaran untuk Dana bagi hasil Opsen PKB dan BBNKB 10%
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah tepat waktu - Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	1.390.608.125	502.808.175	502.808.175	(887.799.950)	-		
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah dan pensertifikatan barang milik daerah, Tersusunnya standar harga	1.390.608.125	502.808.175	502.808.175	(887.799.950)	-		
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	25.500.000	11.804.700	11.804.700	(13.695.300)	-		-
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1.255.108.125	431.586.175	451.586.175	(803.521.950)	20.000.000		Bertambah 20 juta mengambil dari subkegiatan optimalisasi

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumb er Dana	Keterangan
		Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD (Perbup II)	Pagu Indikatif	Renja	APBD		
1	2	3	4	5	6=5-3	7=5-4	8	9
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	110.000.000	59.417.300	39.417.300	(70.582.700)	(20.000.000)		Berkurang 20 juta untuk digeser ke Penatausahaan BMD
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	619.828.400	683.239.930	683.239.930	63.411.530	-		
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah-Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Penyampaian LaporanPendapatan Daerah TepatWaktu- Persentase PenerbitanSurat Ketetapan PajakDaerah Tepat Waktu	619.828.400	683.239.930	683.239.930	63.411.530	-		
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	-	390.430.250	390.430.250	390.430.250	-		Pergeseran antar rekening belanja
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak , Subjek Pajak,dan Wajib Pajak Daerah	172.783.600	76.207.200	76.207.200	(96.576.400)	-		Pergeseran antar rekening belanja

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumb er Dana	Keterangan
		Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD (Perbup II)	Pagu Indikatif	Renja	APBD		
1	2	3	4	5	6=5-3	7=5-4	8	9
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	282.783.600	175.995.400	175.995.400	(106.788.200)	-		Pergeseran antar rekening belanja
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	90.000.000	18.575.250	18.575.250	(71.424.750)	-		Pergeseran antar rekening belanja
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	74.261.200	22.031.830	22.031.830	(52.229.370)	-		Pergeseran antar rekening belanja
Total sebelum ditambah penunjang urusan kewenangan keuda/ Program dan Kegiatan		27.380.007.711	21.709.988.056	23.677.054.031	(3.702.953.680)	1.967.065.975		
Total setelah ditambah penunjang urusan kewenangan keuda		437.021.274.075	417.515.857.016	423.678.804.505	(13.342.469.570)	6.162.947.489		

Dari tabel di atas berdasarkan perhitungan perencanaan kegiatan sampai dengan TA 2025, maka total anggaran Rp 423.678.804.505 BPKPAD Kabupaten Temanggung melalui Perubahan Renja 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pagu awal Renja	Rp. 437.021.274.075
2. Pagu Awal APBD	Rp. 417.515.857.016
3. Pagu Perubahan	Rp. 423.678.804.505
4. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu Awal Renja	Rp. (13.342.469.570)
5. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu awal APBD	Rp. 6.162.947.489

Selisih antara pagu awal Renja dengan pagu perubahan karena menyesuaikan kebutuhan dengan pergeseran dan penambahan anggaran tersebut untuk

- 1. Penyesuan pagu Sub Kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN dan Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota.
- 2. Penyesuaian sub kegiatan Renja terhadap pagu Sub Kegiatan APBD.

Selisih antara pagu awal APBD dengan pagu perubahan karena menyesuaikan kebutuhan dengan pergeseran dan penambahan anggaran tersebut untuk :

- 1. Pada Program pengelolaan keuangan daerah anggaran semula Rp. 396.576.408.360 menjadi Rp. 400.722.289.874 bertambah sebesar Rp. 4.195.881.514 karena :
 - a. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah semula Rp 395.805.868.960 menjadi Rp 400.001.750.474 bertambah sebesar Rp 4.195.881.514 dikarenakan adanya bagi hasil opsen PKB dan BBNKB 10% dari Target.
- 2. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah semula Rp. 19.753.400.551 menjadi Rp 21.720.466.526 bertambah sebesar Rp. 1.967.065.975 digunakan untuk membayar hutang belanja insentif.

3.2. **Matriks Rencana Perubahan Renja BPKPAD Tahun 2025**

Rincian rencana Perubahan Renja BPKPAD tahun 2025 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3. 2
Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung Tahun 2025

PD: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025 (Perbup II)	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah				437.021.274.075	417.515.857.016	423.678.804.505							151.773.555.111
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				437.021.274.075	417.515.857.016	423.678.804.505							151.773.555.111
	KEUANGAN				437.021.274.075	417.515.857.016	423.678.804.505							151.773.555.111
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,Administrasi Umum Perangkat Daerah,Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	23.749.143.186	19.753.400.551	21.720.466.526							23.455.299.986
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	22.380.299.986	18.451.156.551	22.380.891.785			-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	BKPAD		22.380.299.986
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1089 Orang/ bulan	1089 Orang/b ulan	22.380.299.986	18.451.156.551	20.418.222.526	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			22.380.299.986
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentaese Terpenuhinya bahan logistik kantor, terlaksananya perjalanan dinas,dan terpenuhinya instalasi listrik bangunan kantor	100 %	100 %	185.500.000	130.671.000	185.500.000			-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	BKPAD		203.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	10.000.000	6.986.000	9.986.000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			11.000.000

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025 (Perbup II)	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	35.000.000	19.830.000	22.830.000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			38.500.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	15.000.000	9.000.000	11.000.000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			16.500.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu														
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	73.500.000	68.855.000	63.555.000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			80.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	52.000.000	26.000.000	36.000.000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			57.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terbayarnya listrik dan air, terdistribusinya surat serta tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100 %	100 %	980.843.200	974.572.000	980.843.200			-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	BKPPAD		650.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	230.000.000	230.000.000	210.000.000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			250.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	750.843.200	744.572.000	742.972.000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			400.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terbayarnya pajak kendaraan dinas, terpeliharanya gedung, sarana dan prasarana, gedung kantor, serta pendukung gedung kantor	100 %	100 %	202.500.000	197.001.000	202.500.000			-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	BKPPAD		222.000.000

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025 (Perbup II)	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	51 Unit	80.000.000	74.851.000	81.851.000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			88.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	50.000.000	50.000.000	51.900.000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			55.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	25.000.000	24.650.000	24.650.000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			27.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	47.500.000	47.500.000	47.500.000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			52.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	persentase dokumen penganggaran tepat waktu Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	100 93 % %	100 93 % %	411.261.694.364	396.576.408.360	400.772.289.874							125.451.255.125
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Dokumen Rencana Anggaran yang Tepat Waktu dan Tepat Mutu	100 %	100 %	534.988.000	215.562.000	272.500.000			-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	SKPD se-Kab Temanggun		616.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS													
		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	55.000.000	17.692.500	17.692.500	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			60.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS													
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000	10.844.000	10.844.000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana			44.000.000

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025 (Perbup II)	RKPD Perubahan 2025			Nasional				Daerah
										pelayanan publik				
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD													
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	194.261.200	84.635.000	84.635.000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			242.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD													
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	245.726.800	102.390.500	102.390.500	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			270.000.000
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen hasil tata kelola Kas Daerah	100 %	100 %	389.964.000	265.321.500	265.321.500			-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	SKPD se-Kab Temangg ung		514.000.000
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah													
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	6000 Dokumen	6000 Dokumen	389.964.000	265.321.500	265.321.500	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			514.000.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100 %	100 %	695.476.000	289.655.900	375.882.000			-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	SKPD se-Kab Temangg ung		765.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota													
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	16 Dokum en	16 Dokume n	235.000.000	189.772.100	189.772.100	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			258.500.000

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025 (Perbup II)	RKPD Perubahan 2025			Nasional				Daerah
		Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota												
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	46 Orang	46 Orang	460.476.000	99.883.800	99.883.800	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			506.500.000
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersalurkannya bantuan keuangan dan pengelolaan dana bagi hasil serta pengelolaan dana darurat dan mendesak	100 %	100 %	409.641.266.364	395.805.868.960	400.001.750.474			-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	SKPD Pengamp u Bankeu		123.555.755.125
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	12 Laporan	392.152.666.000	386.005.132.086	386.005.132.086	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			122.555.755.125
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan	2.500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			1.000.000.000
Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota														
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	6 Laporan	6 Laporan	14.988.600.364	8.800.736.874	12.996.618.388	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			-

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025 (Perbup II)	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah tepat waktu persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	100 80 % %	100 80 % %	1.390.608.125	502.808.175	502.808.175							1.548.000.000
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	1.390.608.125	502.808.175	564.876.125			-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	SKPD		1.548.000.000
	Penyusunan Standar Harga													
		Jumlah Standar Harga yang Disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	25.500.000	11.804.700	11.804.700	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			28.000.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah													
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1236 Laporan	1236 Laporan	1.255.108.125	431.586.175	451.586.175	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			1.400.000.000
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah													
		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	600 Dokumen	600 Dokumen	110.000.000	59.417.300	39.417.300	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			120.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	persentase realisasi penerimaan pajak daerah persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	95,5 9 100 % % %	95,5 9 100 % % %	619.828.400	683.239.930	683.239.930							1.319.000.000
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pendataan dan pendaftaran objek pajak beserta pelayanan surat ketetapan dan pemutakhiran data pajak daerah tepat waktu	100 %	100 %	619.828.400	683.239.930	791.448.200			-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Wajib Pajak dan SKPD Pengelol a Pendapat an		1.319.000.000

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025 (Perbup II)	RKPD Perubahan 2025			Nasional				Daerah
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah													
		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	-	1 Dokumen	-	390.430.250	390.430.250	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			440.000.000
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah													
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	172.783.600	76.207.200	77.352.200	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			275.000.000
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah													
		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	282.783.600	175.995.400	174.850.400	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			395.000.000
	Penagihan Pajak Daerah													
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	90.000.000	18.575.250	18.575.250	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			99.000.000
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah													
		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	74.261.200	22.031.830	22.031.830	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			110.000.000
					437.021.274.075	417.515.857.016	423.678.804.505							151.773.555.111

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja BPKPAD Tahun 2025 yang telah disusun sesuai dengan Renstra BPKPAD Tahun 2024-2026 mengacu pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2025. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sampai dengan triwulan I ini, pagu anggaran yang ada di dalam Renja BPKPAD Tahun 2025 ini memerlukan penyesuaian-penyesuaian pada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan.

Perubahan Rencana kerja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Temanggung. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program dan Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Perubahan Rencana kerja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Perubahan Tahun Anggaran 2025, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja yang berdampak pada perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Dalam Perubahan Renja Tahun 2025, BPKPAD terdiri dari 4 (empat) Program 10 (sepuluh) Kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan yang terdiri dengan total pagu indikatif Rp 423.678.804.505,00 yang terdiri dari :

- | | | | |
|----|-------------------------------|-----|--------------------|
| a. | Pagu Program dan Kegiatan | Rp. | 23.677.054.031,00 |
| b. | Pagu Program Penunjang Urusan | Rp. | 400.001.750.474,00 |

Kewenangan Pengelolaan Keuda

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan BPKPAD pada perubahan Renja Tahun 2025 juga senantiasa berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Upaya untuk mematuhi aturan Perundang-undangan tersebut adalah dalam rangka untuk tertib administrasi, tertib waktu, dan tepat mutu (*Good and Clean Governance*) dari setiap kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2025 ini.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Perubahan Renja BPKPAD Tahun 2025 ini, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan dapat tercapai sesuai dengan pentahapan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 10 Juni 2025
 KEPALA BPKPAD

 TRI WINARNO, S.E., M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19731020 199903 1 005